

Bupati HST Launching Bansos Beras pada Keluarga PKH Kab. HST Tahun 2020



Bupati HST H.A. Chairansyah saat menyerahkan secara simbolis pada Acara Launching Bansos Beras pada keluarga PKH Kab. HST Tahun 2020 bertempat di Kantor Bulog Subdrive Barabai

Kepala Dinsos PPKBPP & PA H. M. Yusuf menyampaikan Program bantuan sosial beras ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)¹ di Kab. HST agar kebutuhan pangan beras bagi keluarga terdampak Covid-19 bisa terpenuhi dan tetap terjaga kesehatannya, penyaluran sembako pada penerima PKH di Kab. HST sebanyak 8.306 KPM, masing-masing mendapatkan 15kg/KPM atau jumlah beras sebanyak 124.590 kg/bulan.

Program ini berlangsung untuk periode Juli sampai September dengan volume beras yang disalurkan sebesar 15 kilogram (kg)/KPM per bulan artinya, setiap penerima manfaat akan memperoleh 45 kg beras kualitas medium sampai September, pada bulan September ini akan disalurkan sebanyak 2 bulan yaitu untuk bulan Juli dan Agustus jadi setiap KPM akan menerima 30 kg Beras.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bulog Subdrive Barabai Budiawan mengemukakan bahwa penyaluran yang dimulai pada September ini dengan volume untuk

¹ Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. (<https://kemosos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>)

alokasi dua bulan sekaligus, yakni 30 kg dengan jumlah KPM 8.306. Maka, total stok beras kelolaan Bulog yang akan disalurkan mencapai 249.180 kg.

Seterusnya Budiawan menyampaikan terkait dua fungsi Bulog yaitu pertama menjaga Harga di Tingkat Konsumen & Produsen, bagaimana Bulog mampu menjaga harga di tingkat produsen dan bagaimana Bulog menjaga harga di tingkat konsumen agar tidak terjadi gejolak yang menyebabkan kenaikan sehingga harus dilakukan operasi pasar.

Kedua Aspek Komersial, selain harus memenuhi aspek sebagai stabilisator, Bulog juga memiliki fungsi komersial karena sebagai BUMN harus memiliki pendapatan untuk menghidupi dan membesarkan Bulog secara keseluruhan. Budiawan mengungkapkan bahwa secara aspek komersial, Bulog melakukan serangkaian strategi bisnis untuk dapat menopang pendapatan.

Selanjutnya H.A.Chairansyah menyampaikan untuk kesekian kalinya Pemerintah kembali menyalurkan Bansos untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat karena dampak Pandemi virus Corona, Bansos Beras ini merupakan salah satu program jaring pengaman sosial yang merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Sosial dengan Bulog.

Atas nama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kab. HST mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial serta Bulog dengan adanya Program Bantuan Sosial ini, dimana dapat membantu dalam sektor pemulihan ekonomi masyarakat, tugas pelaksanaan program Bansos ini tentunya memerlukan sinergitas dari kita semua, baik Kemensos, Bulog, Pemerintah Daerah khususnya Dinsos atau pun pemangku kepentingan.

H.A.Chairansyah berharap untuk keluarga penerima manfaat dapat menggunakan bantuan beras ini guna memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya pemenuhan asupan karbohidrat, sehingga dapat menunjang peningkatan imunitas tubuh dalam menghadapi wabah bencana covid-19 di Kab. HST.

Acara dirangkai dengan launching Bansos Beras dengan ditandai penyerahan secara simbolis Oleh Bupati HST H.A.Chairansyah kepada tiga perwakilan KPM an. Hartini Muliana, Wahidah dan Rusdiah ketiganya berasal dari desa Mandingin Kec. Barabai.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinsos PPKBPP & PA, Kepala Bulog Subdrive Barabai beserta jajarannya, PT BGR, SekCam Barabai, Para Pendamping PKH koordinator Kab/Kec dan Penerima Simbolis Bansos Beras.

Sumber Berita:

1. <https://matabanua.co.id>, *Bupati HST Launching Bansos Beras Pada Keluarga PKH Kab HST Tahun 2020*, Rabu 9 September 2020
2. <https://kalselpos.com>, *Bupati HST Launching Bansos Beras Bagi Keluarga PKH*, 10 September 2020

Catatan Berita:

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

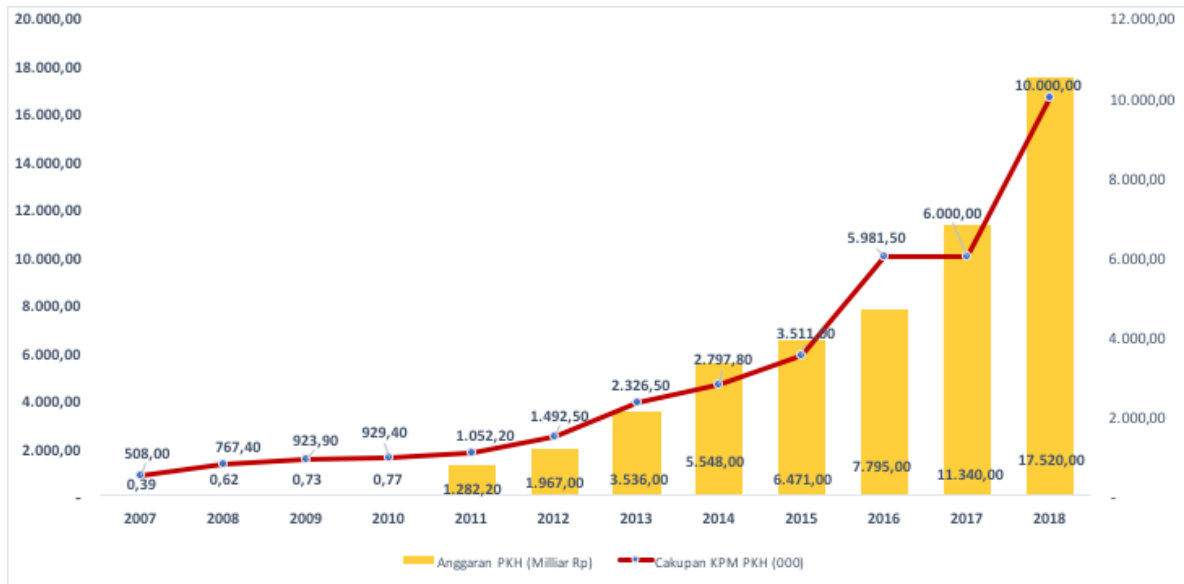
Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah

penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.



Gambar 1. Cakupan PKH Tahun 2007 s.d. 2018

- Pada PJP Tahun 2010 - 2014 terjadi peningkatan target *beneficiaries* dan alokasi budget PKH, melampaui *baseline* target perencanaan
- Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 10 Triliun
- Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 11,5 Triliun
- Jumlah penerima PKH tahun 2018 sebanyak 10.000.232 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,5 Triliun
- Target penerima PKH tahun 2019 sebanyak 10 juta KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32,65 Triliun

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan

untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.

Di kuartal III tahun 2020, Kementerian Sosial kembali meluncurkan program bantuan sosial berupa beras dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menanggapi arahan Presiden, agar kementerian mendorong program yang memiliki daya ungkit perekonomian. Salah satunya adalah Bansos Beras yang bisa membantu mengurangi sebagian beban ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut Mensos menyatakan bahwa Bansos Beras akan disalurkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang akan diberikan selama 3 bulan berturut-turut. Total sasaran dalam program ini sebanyak 10 juta KPM.

Program bansos beras ini merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam penanganan COVID-19, selain dari program reguler PKH, Sembako, dan BPNT yang sudah terlaksana sebelumnya.

Data yang akan digunakan sebagai dasar penerima bansos beras adalah data *by name by address* (BNBA) perluasan. Data ini merupakan KPM PKH yang menerima bantuan bulan Agustus 2020. Transporter adalah pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk membantu pengantaran beras dari Perum Bulog sampai ke KPM PKH.